

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Di Indonesia emisi karbon menjadi perhatian utama dalam konteks perubahan iklim global dan tantangan lingkungan. Sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi yang sedang berkembang pesat, Indonesia menghadapi tantangan kompleks terkait emisi karbon dari berbagai sektor ekonomi dan aktivitas manusia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang unik, seperti hutan tropis yang merupakan salah satu cadangan karbon terbesar di dunia. Namun, deforestasi, perambahan hutan, dan konversi lahan menjadi pertanian atau infrastruktur telah menyebabkan kerugian besar dalam hal emisi karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral menjadi salah satu bentuk diplomasi lingkungan yang diarahkan pada pencapaian hasil yang nyata. Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Norwegia mengaitkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab bersama dalam menghadapi isu perubahan iklim. REDD+ dipahami sebagai instrumen yang mendukung pengurangan emisi karbon sekaligus sejalan dengan kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Skema ini berfungsi sebagai bagian dari kerangka kebijakan nasional dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Peneliti melihat bahwa mekanisme *result-based contribution* (RBC) menjadi elemen utama dalam hubungan kerja sama Indonesia–Norwegia. Mekanisme ini mendorong penguatan tata kelola kehutanan nasional serta peningkatan sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV). Penerapan MRV memungkinkan capaian penurunan emisi diverifikasi secara transparan dan kredibel. Pembayaran berbasis hasil dari Norwegia memberikan dorongan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi kebijakan pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. Pola ini memperkuat kepercayaan dalam hubungan bilateral kedua negara.

Dari aspek implementasi kebijakan, kerja sama REDD+ berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan nasional. Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menjadi semakin

signifikan dalam pelaksanaan program. Integrasi REDD+ ke dalam kebijakan nasional dan agenda FOLU *Net Sink* 2030 menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan strategi pembangunan jangka panjang. REDD+ diposisikan sebagai bagian dari kerangka kebijakan nasional. Temuan ini menguatkan asumsi penelitian mengenai pentingnya sinergi antara komitmen internasional dan kebijakan domestik.

Peneliti melihat bahwa kerja sama Indonesia–Norwegia berkontribusi terhadap penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan di sejumlah wilayah prioritas. Praktik pengelolaan hutan mengalami perbaikan melalui pendekatan berbasis hasil dan penguatan tata kelola. Fokus implementasi diarahkan pada penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar hutan masih bersifat terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan distribusi manfaat di tingkat lokal untuk mendukung keadilan iklim.

Dalam perspektif *Green Theory*, kerja sama Indonesia–Norwegia dalam skema REDD+ mencerminkan orientasi hubungan internasional yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai nilai utama. Dukungan Norwegia terhadap Indonesia menunjukkan pengakuan atas tanggung jawab negara maju dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kerja sama ini dipahami sebagai bentuk solidaritas ekologis antarnegara. Nilai moral dan kepedulian terhadap lingkungan global menjadi bagian dari dasar kemitraan tersebut. Temuan ini sejalan dengan asumsi penelitian mengenai peran diplomasi lingkungan dalam tata kelola global.

Melalui perspektif Kerja Sama Internasional, kemitraan Indonesia–Norwegia dibangun atas dasar kepentingan bersama dan kepercayaan. Hubungan ini ditopang oleh mekanisme institusional yang jelas dan terstruktur. Transparansi tata kelola dan konsistensi kebijakan berperan dalam menjaga keberlanjutan kerja sama. Pembagian peran antara kedua negara dirumuskan secara formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional di bidang iklim dapat berjalan optimal dengan dukungan kerangka institusional yang kredibel.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Norwegia melalui skema REDD+ pada periode 2016–2025 berperan dalam mendukung upaya pengurangan emisi karbon di Indonesia. Tujuan penelitian tercapai melalui analisis

terhadap mekanisme kerja sama, pelaksanaan kebijakan, serta dampaknya terhadap tata kelola kehutanan. Asumsi penelitian mengenai kinerja kerja sama bilateral berbasis hasil dapat diterima berdasarkan temuan yang diperoleh. Pelaksanaan REDD+ turut memperkuat posisi Indonesia dalam agenda perubahan iklim di tingkat global. Skema ini dapat dipandang sebagai contoh kerja sama internasional yang relevan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan keadilan iklim di negara berkembang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kerja sama Indonesia–Norwegia dalam pengurangan emisi karbon melalui skema REDD+, penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi skema REDD+ ke dalam seluruh perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan pengendalian deforestasi selaras dengan target FOLU Net Sink 2030 secara operasional. Harmonisasi regulasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan implementasi REDD+. Penguatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah ini mendukung akuntabilitas capaian pengurangan emisi karbon di tingkat nasional dan internasional.

- a. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan REDD+ di tingkat pusat dan daerah.
- b. Pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan implementasi REDD+ agar kebijakan pengelolaan hutan sesuai dengan kondisi wilayah dan kapasitas kelembagaan lokal.
- c. Masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan perlu dilibatkan melalui peningkatan kapasitas dan mekanisme partisipasi yang terstruktur untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
- d. Skema distribusi manfaat pendanaan REDD+ perlu diperjelas agar insentif ekonomi dapat dirasakan secara adil dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan.